

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Di pedesaan, kegiatan perekonomian masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/ pedesaan yang sulit untuk diputus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek spatial dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian.

Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)

merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program PNPM Mandiri bisa dikatakan kegiatan yang sangat komprehensif mengurangi serta mengatasi kemiskinan sebab PNPM didalamnya meliputi SPP (Simpan Pinjam Perempuan), PNPM Pendidikan dan PNPM Infrastruktur dengan membangun desa.

Kegiatan pengukuran kinerja PNPM mandiri Perdesaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau terhadap kegiatan operasional. Dengan pengukuran kinerja salah satunya adalah mengukur seberapa pendapatan operasional dan beban operasionalnya yang disebut "*Efisiensi*".

Efisiensi merupakan tingkat kinerja manajemen dalam penggunaan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur efisiensi adalah dengan memakai rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional). BOPO merupakan rasio efisiensi untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:111).

Posisi BOPO pada PNPM Mandiri sebaiknya rata –rata di setiap kecamatan harusnya efisien dimana pada posisi BOPO pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo ini ada yang mengalami penurunan namun ada juga yang masih mengalami peningkatan. Maka dari itu masih ada masalah manajemen perusahaan yang bersangkutan dalam mengolah tingkat efisiensi yang terjadi, sehingga perlu diteliti dan masalah yang terjadi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel. 1.1
PERKEMBANGAN BOPO UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PNPM MANDIRI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012-2013

Tahun	BOPO		
	TARIK	JABON	WONOAYU
Januari -2012	14.85	11.49	23.59
Februari	15.39	11.35	23.69
Maret	16.41	11.96	35.26
April	16.44	11.87	18.08
Mei	16.14	11.66	21.36
Juni	15.53	11.27	19.20
Juli	15.02	10.87	18.12
Agustus	14.63	10.96	17.46
September	14.92	10.87	16.49
Oktober	15.28	11.10	15.18
November	15.14	11.08	14.56
Desember	15.09	11.05	14.34
Januari-2013	14.55	13.66	10.51
Februari	15.76	11.63	12.00
Maret	15.41	11.61	9.55
April	15.41	11.46	10.09
Mei	16.31	11.30	10.48
Juni	15.48	12.12	9.76
Juli	15.44	11.77	9.78
Agustus	14.91	11.62	9.86
September	14.47	11.31	9.74
Rata-Rata	15.36	11.52	15.67

Sumber : Kantor pengelolaan PNPM Mandiri Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan latar belakang dan tabel 1.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan Wonoayu yang memiliki rata-rata tertinggi dengan rata-rata 15.67. Karena semakin tinggi rata-rata BOPO kecamatan maka sangat buruk kecamatan tersebut. Dalam teori diatas dapat mempengaruhi BOPO antara lain pada aspek rasio likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi dan jumlah KSM. Tetapi dalam penelitian ini indikator utama yang digunakan adalah LAR, NPL, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK dan Fasilitator Lapangan.

Rasio Likuiditas dalam dunia perbankan merupakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana depositonya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir 2012:315). Adapun rasio yang bisa digunakan untuk rasio ini adalah Loan to Asset Rasio (LAR).

Loan to Assets Rasio (LAR) adalah merupakan kemampuan PNPM Mandiri untuk memenuhi permintaan kredit yang diberikan dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio yang ada maka menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditasnya. Menurut Kasmir (2008:286).

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja di dalam perusahaan. Salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam rumus yang digunakan pada PNPM mandiri Perdesaan NPL adalah dimana jumlah KSM menunggak > 3 bulan dengan jumlah KSM Peminjam.

Rata-rata Pinjaman dalam PNPM Mandiri UPK dalam program PNPM yang menangani Simpan Pinjam bagi masyarakat di wilayah kami. Tugas kami adalah memberikan pinjaman uang (secara bergulir) kepada masyarakat kurang mampu yang ingin membuka usaha (ekonomi). Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ada jasa yang harus diberikan peminjam sebesar 2% dengan jangka waktu 10 bulan tanpa jaminan hanya menyertakan fotocopy KTP dan KK.

Kualitas UPK merupakan dimana nantinya kolektibilitas yang menunjukkan kualitas pinjaman yang dikaitkan dengan jumlah tunggakan diatas 6 bulan dibandingkan dengan total saldo pinjaman serta dapat dilihat dari beberapa per kecamatan mana yang baik dan buruk dalam proses pengelolaan keuangannya. Ini berfungsi mempermudah penelitian kami tentang PNPM Mandiri di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sidoarjo.

Fasilitator Lapangan untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Dengan melihat perkembangan BOPO diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelola UPK perlu sebaiknya memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi BOPO serta diharapkan pengelola UPK dapat mengelola BOPO lebih efisien sesuai harapan perusahaan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

meneliti Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya di Kabupaten Sidoarjo dengan berbagai kecamatan di dalamnya.

Maka dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul **“Pengaruh LAR, NPL, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK, dan Fasilitator Lapangan Terhadap BOPO Pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah variabel *Loan to Assets Ratio (LAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK, dan Fasilitator Lapangan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah variabel *Loan to Assets Ratio (LAR)* secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah variabel *Non Performing Loan (NPL)* secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah variabel Rata-rata Pinjaman secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?

5. Apakah variabel Kualitas UPK secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
6. Apakah variabel Fasilitator Lapangan secara individu memiliki pengaruh positif/negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
7. Manakah diantara variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel *Loan to Assets Ratio (LAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK, dan Fasilitator Lapangan secara bersama-sama terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif variabel *Loan to Assets Ratio (LAR)* secara parsial terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Mengetahui signifikansi pengaruh positif variabel *Non Performing Loan (NPL)* secara parsial terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?

4. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif variabel Rata-rata Pinjaman secara parsial terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
5. Mengetahui signifikansi pengaruh positif variabel Kualitas UPK secara parsial terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
6. Mengetahui signifikansi pengaruh positif/negatif variabel Fasilitator Lapangan secara parsial terhadap tingkat BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
7. Mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini, Seperti :

1. Bagi PNPM Mandiri

Sebagai salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan dalam mengatasi masalah serta sebagai acuan pengambilan keputusan yang sangat bermanfaat bagi PNPM Mandiri Perdesaan agar dapat mengetahui di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efisien di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perhitungan keuangan di bidang perbankan serta pengoperasian keuangan di dalam lingkup PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Bagi STIE Perbanas

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan perbendaharaan koleksi perpustakaan dan juga sebagai pembanding bagi mahasiswa yang mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan untuk memperjelas maksud dan tujuannya maka peneliti membuat sistematika penyusunan melalui beberapa tahapan yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran yang akan diteliti serta hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif dan pengujian hipotesis serta selanjutnya pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari analisis data yang telah dilakukan. Disamping itu juga disertakan keterbatasan penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dasar pengambilan keputusan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.